

Bagian 1: Penilaian Proses Perencanaan

PENILAIAN AGENDA SETTING KEBIJAKAN (Presentase Bobot 40%)

Tahapan/Pertanyaan Kunci	Bobot	Jawaban	Bukti	Pedoman
Identifikasi Masalah				
a Apa yang menjadi dasar perumusan kebijakan (sumber permasalahan kebijakan atau policy problem)?		amanat peraturan perundang-undangan (termasuk proleg, RPJM, Renstra)	pilih salah satu jawaban yang paling relevan dengan melampirkan bukti dokumentasi yang sesuai dengan pilihan jawaban	Amanat peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari terbentuknya isu permasalahan kebijakan. Baik dalam bentuk program legislasi, RPJM maupun renstra.
		instruksi/pernyataan pimpinan instansi		Instruksi/pernyataan pimpinan adalah pernyataan yang dikeluarkan secara langsung oleh pimpinan, dengan tertulis maupun tidak tertulis.
		isu-isu aktual (termasuk antisipasi dan respon)		Isu-isu aktual yang terpilih merupakan isu aktual yang telah melalui kajian permasalahan, maupun studi secara langsung dan diskusi dengan stakeholder terkait, untuk memastikan tingkat urgensi permasalahan.
Kajian terhadap masalah kebijakan (Bobot 50%)				
a Identifikasi masalah kebijakan (Bobot 70%) Apakah masalah perencanaan		contohnya ada berita media		Identifikasi masalah kebijakan merupakan tahapan untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan diselesaikan melalui suatu kebijakan memang layak dan merupakan kewenangan Pemda.
a.1 yang diidentifikasi mendapatkan perhatian luas masyarakat/pemangku kepentingan?	Bobot 25%	Ya	Tidak	Perhatian luas masyarakat/kelompok kepentingan disini merupakan tingkat ketertarikan hingga responsibilitas masyarakat terhadap masalah kebijakan yang terjadi.
			massa, surat pembaca, hasil kajian/telaahan, surat keluhan, protes tertulis, <i>quick survey</i> isu, forum diskusi (stakeholder meeting), lainnya yang relevan	

a.2	Apakah masalah kebijakan yang diidentifikasi berkaitan langsung dengan tanggung jawab Pemda?	Bobot 25%	Ya	Tidak	Tupoksi Pemda, atau kewenangan yang merupakan amanat aturan perundangan/ Dasar hukum dari terbitnya kebijakan	Keterkaitan yang dimaksud merupakan sinkronisasi isu masalah kebijakan dengan menelaah tugas, pokok, dan fungsi dari K/L/Pemda yang dituju dengan maksud tidak adanya tumpang tindih dalam pengambilan dan	
a.3	Apakah masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan agenda kebijakan instansi atau pemerintah?	Bobot 25%	Ya	Tidak	amanat peraturan perundang-undangan (termasuk proleg, RPJM, Renstra)	Isu yang termasuk agenda merupakan isu permasalahan kebijakan publik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dalam agenda isu strategis pembangunan jangka panjang maupun peraturan turunan yang dibuat pemerintah dan instansi lain di luar pemerintah.	
a.4	Apakah masalah kebijakan yang diidentifikasi mengandung penafsiran yang dapat mendiskriminasi kelompok tertentu (perempuan, <i>disable</i> , anak, minoritas- GESI) didasarkan prasangka negatif terhadap mereka atau pandangan yang bias?	Bobot 25%	Ya	Tidak	Rekomendasi dari Komnas Anak, Komnas Perempuan, Organisasi disabilitas yang menunjukkan adanya statemen diskriminatif atau menimbulkan tafsir yang dapat mendiskriminasi GESI -Hasil FGD yang melibatkan kelompok GESI	UU kewajiban pengarusutamaan gender, Anggaran yang responsif GESI, UU anti diskriminasi terhadap perempuan, Undang- Undang Perlindungan anak, Peraturan tentang perlindungan kepada orang dengan disabilitas atau kelompok minoritas. Salah satu referensi regulasi pemenuhan hak-hak disabilitas yaitu UU 8/2016 Penyandang Disabilitas	
b	<i>Assesment (kajian awal atas permasalahan kebijakan)</i> (Bobot 30%)					Tahap Asessment ini sebagai upaya untuk memastikan <i>policy problem yang ditentukan sudah melalui uji dengan metode/alat assessment yang tepat untuk menentukan urgensi permasalahan</i>	
b.1	Apakah hasil <i>assessment</i> /analisis menunjukkan bahwa isu memiliki dampak kepada masyarakat/ organisasi?	Bobot 50%	Ya	Tidak	Dokumentasi hasil <i>assessment</i> . (keterangan/penjelasan)	Assessment/analisis terhadap isu yang sudah teridentifikasi merupakan sebuah tahapan melalui proses/metode yang dapat memberikan hasil konsisten sesuai dengan urgensi permasalahan dan dibuktikan dengan dokumentasi yang baik.	

b.2	Apakah hasil <i>assessment</i> memuat jenis intervensi atau kebijakan yang dipilih?	Bobot 50%	Ya	Tidak	Dokumentasi hasil assesment yang memuat bentuk intervensi kebijakan (ada informasi tetapi belum terdokumentasi)			Metode/proses assessment memuat gambaran mengenai jenis intervensi seperti internal, eksternal, dan reprisal yang yang dilakukan dalam proses penentuan kebijakan yang dipilih seperti usulan yang dipaksakan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan dapat dibuktikan dengan dokumentas hasil assesment.
Konsultasi publik terhadap isu dan <i>assesment</i> yang dilakukan. (Bobot 50%)								Konsultasi publik yang dimaksud adalah konsultasi publik terhadap masalah kebijakan
a	Apakah dilakukan konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan isu dan <i>assesment</i> ?	Bobot 30%	Ya	Tidak	Dokumentasi proses konsultasi atau penginformasian			Konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan isu dan <i>assesment</i> dimaksudkan untuk memperoleh diskusi ringan maupun feedback dari para stakeholder terkait seperti kegiatan musyawarah, FGD, dan kegiatan lain mengenai isu yang telah mengemuka dan penyelesaian dengan arah kebijakan kedepan.
b	Siapa pemangku kepentingan yang terlibat?	Bobot 40%	Internal Instansi	Eksternal instansi yang berasal dari pemerintah (yang berkaitan dengan isu kebijakan)	Kelompok masyarakat umum (termasuk akademis, asosiasi, NGO, dan kelompok rentan)	kelompok masyarakat rentan atau terancam mengalami kerentanan akibat sebuah kebijakan	Dapat memilih lebih dari satu jawaban (perlu ditambahkan stakeholder terkait seperti asosiasi atau kelompok lain)	<p>Pemangku kepentingan merupakan unsur element (masyarakat, swasta, pemerintah, LSM, termasuk LSM perempuan dan disabilitas) yang terlibat proses konsultasi isu kebijakan yang terpilih yang terkena dan memberi dampak dalam memastikan isu kebijakan yang dipilih, dengan pembuktian dokumen pendukung seperti berita acara, notulensi, dan daftar hadir.</p> <p>Memastikan apakah isu kebijakan yang dipilih telah melau proses konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan orang dengan disabilitas. Dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung (berita acara, daftar hadir, notulensi, dll yang dapat memperlihatkan keterlibatan stakeholders)</p>

c	Apakah rekomendasi/keepakatan hasil konsultasi ditindaklanjuti?	Bobot 30%	Ya	Tidak, kenapa?	Dokumen hasil konsultasi	<p>Bentuk-bentuk konsultasi publik misalnya uji publik, FGD, audiensi, siaran pers melalui radio, tv, dll. Dalam uji publik dan FGD ini keragaman peserta yang mewakili perempuan, kelompok disabilitas dipastikan mendapatkan akses dan sarana untuk berpartisipasi.</p> <p>Menindaklanjuti rekomendasi/keepakatan apakah ada perubahan dan masukan dengan penjelasan maupun pemaparan hasil konsultasi dengan rumusan kebijakan kedepan.</p>
						<p>Memastikan apakah catatan dan atau perubahan terhadap hasil assessment sesuai dengan hasil konsultasi.</p>

B. PENILAIAN FORMULASI KEBIJAKAN (Presentase Bobot 60%)						
Tahapan/Pertanyaan Kunci		Nilai	Jawaban		Bukti	Pedoman
B.1 Berorientasi kedepan (Bobot 20%)						
a	Apakah tujuan kebijakan berorientasi pada penyelesaian masalah dan mengatasi kesenjangan?	Bobot 20%	Ya	Tidak	Jelaskan keterkaitan tujuan kebijakan dijabarkan dalam kriteria dan indikator-indikator yang relevan dengan masalah. Tampilkan bukti-bukti yang terukur dan jelas (bukan opini) tentang kesenjangan yang diatasi. Misalnya kesenjangan pada perempuan, anak, orang dengan disabilitas atau kelompok yang termarginalkan.	Kebijakan memiliki tujuan yang secara jelas mampu menyelesaikan permasalahan publik dan tidak menimbulkan implikasi lain yang tidak diinginkan. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam kriteria dan indikator-indikator yang relevan dengan permasalahan kebijakan.
b	Apakah tujuan kebijakan selaras dengan tujuan jangka menengah instansi?	Bobot 20%	Ya	Tidak	Jelaskan keterkaitan tujuan kebijakan dan tujuan jangka menengah instansi.	Kebijakan memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan jangka menengah instansi dan disertai penjelasan mengenai keselarasan tersebut.
c	Apakah tujuan kebijakan sesuai dengan tujuan nasional?	Bobot 15%	Ya	Tidak	Jelaskan keterkaitan Tujuan kebijakan dan tujuan jangka menengah nasional.	Kebijakan memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan nasional. Dalam situasi dan kondisi tertentu, kebijakan yang dirumuskan juga menggaris masalah-masalah makro strategis guna mencapai tujuan nasional.
d	Apakah kebijakan didukung oleh mekanisme penganggaran?	Bobot 15%	Ya	Tidak	Jelaskan mekanisme penganggaran untuk mendukung penyusunan kebijakan dan apakah sesuai dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan	Kebijakan juga perlu didukung mekanisme penganggaran yang jelas.
e	Apakah tujuan kebijakan tidak mengeliminasi kepentingan kelompok rentan (perempuan, anak, orang dengan disabilitas, minoritas) dan memastikan kebijakannya berperspektif GESI?	Bobot 15%	Ya	Tidak	Jelaskan tujuan kebijakan dengan nilai-nilai yang mendukung GESI	Kebijakan dipastikan tidak akan menimbulkan dampak diskriminatif kepada kelompok rentan dan selaras dengan UU perlindungan terhadap perempuan, anak, dan orang dengan disabilitas.
f	Apakah kebijakan adaptif terhadap dinamika lingkungan (di masa depan)?	Bobot 15%	Ya	Tidak	Jelaskan bagaimana kebijakan memuat pertimbangan dan evaluasi sesuai perkembangan lingkungan, termasuk kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial, gender, dan politik yang bisa berdampak kepada kelompok rentan.	Dengan visi yang jelas, kebijakan memungkinkan untuk mengimbangi tantangan lingkungan yang dinamis, kompleks, penuh ketidakpastian, dan sulit untuk diprediksi arah perubahannya.

B.2 Outward Looking (Bobot 20%)							
a	Apakah dilakukan penginformasian rancangan kebijakan kepada pemangku kepentingan (termasuk instansi lain dan masyarakat)?	Bobot 25%	Ya	Tidak	Jika "Ya", sebutkan bukti. Bukti terdiri dari Berita Acara; Notulensi; Daftar Hadir, dsb.	Penginformasian rancangan kebijakan yang dimaksud terkait dengan rancangan kebijakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dimaksud termasuk mereka yang rentan terpinggirkan dalam menerima informasi yang disebabkan oleh keterbatasan akses baik akibat keadaan fisiknya atau hambatan sosial- budayanya.	
b	Apakah dilakukan konsultasi rancangan kebijakan kepada pemangku kepentingan (termasuk instansi lain dan masyarakat)?	Bobot 25%	Ya	Tidak	Jika "Ya", sebutkan bukti, Bukti terdiri dari Berita Acara; Notulensi; Daftar Hadir, Surat Keterangan, dsb.	Konsultasi publik yang dimaksud adalah konsultasi terkait rancangan kebijakan yang dibuat melalui mekanisme dan proses dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan baik oleh eksekutif maupun legislatif. Pelibatan masyarakat dimaksud termasuk mereka yang rentan terpinggirkan dalam proses konsultasi baik akibat hambatan fisiknya (disabilitas) maupun hambatan sosial- budayanya (disabilitas dan gender).	
c	Apakah masyarakat yang diajak berkonsultasi telah secara representatif mengakomodasi keragaman kelompok dari sisi umur, jenis kelamin/gender, keadaan fisik, latar belakang sosial ekonomi dan suku, ras/agama.	Bobot 25%	Ya	Tidak	Jika ya sebutkan	Pertimbangkeragaman masyarakat untuk membantu agar kebijakan tidak bias, tidak menimbulkan diskriminasi kepada mereka yang tidak memiliki keterwakilan suara.	
d	Apakah penyusunan kebijakan melibatkan penerima manfaat/terdampak seperti perempuan, anak, kelompok dengan disabilitas, kelompok minoritas yang rentan?	Bobot 25%	Ya	Tidak	Jika "Ya", sebutkan bukti. Bukti terdiri dari Berita Acara; Notulensi; Daftar Hadir, Surat Keterangan, dsb.	Penyusunan kebijakan yang dimaksud dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan (baik penerima manfaat atau terdampak).	

B.3 Berbasis data (Bobot 20%)								
	a	Apakah dilakukan kajian dan analisis untuk pengambilan keputusan?	Bobot 15%	Ya	Tidak		Kajian yang dimaksud meliputi evaluasi dan analisis terhadap kebijakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Misal: CBA,RIA, dll.	
	b	Apakah data yang diambil telah menimbang data terpilah secara gender dan data yang mengakomodasikan kelompok orang dengan disabilitas, sertamenggunakan metode yang dapat memastikan suara kelompok rentan terakomodasi?	Bobot 10%	Ya	Tidak	Jika "Ya", sebutkan bukti.	Gunakan metode yang komprehensif, minimal kuantitatif dan kualitatif agar kelompok rentan dapat terdengar suara dan kepentingannya.	
	c	Apakah tersedia alternatif kebijakan dari riset yg dilakukan, evaluasi, dan/atau ujicoba dalam perumusan kebijakan?	Bobot 20%	ya, alternatif memperhatikan konteks permasalahan kebijakan	ya, alternatif hanya memperhatikan hasil kajian teoretis	Tidak	metode apa yang digunakan untuk analisis risiko dan informasi yang diperoleh	Analisis resiko dilakukan dengan menggunakan metode dan berdasarkan informasi/data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
	c.1	Jika "Ya", apakah dilakukan analisis risiko atas alternatif kebijakan?	Bobot 100%	Ya	Tidak			
	d	Apakah hasil evaluasi atas masalah dan/atau hasil kebijakan terdahulu digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan?	Bobot 10%	Ya	Tidak	Jika "Ya", sebutkan bukti	Pertimbangan yang dimaksud berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku (terdahulu) serta peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, baik secara vertikal maupun horizontal dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang akan dibuat. Bukti terdiri dari Naskah Akademik, Policy Paper, Policy Brief, dsb.	

	e	Apakah rekomendasi/kesepakatan hasil konsultasi rancangan kebijakan ditindaklanjuti?	Bobot 10%	Ya	Tidak	Jika "Ya", sebutkan bukti.	Rekomendasi/Kesepakatan yang dimaksud disusun dengan memperhatikan antara lain masukan dari masyarakat, pihak yang berkepentingan, kelompok yang paling rentan yang tak tersuarakan kepentingannya seperti perempuan, anak, orang dengan disabilitas, dan penyusun kebijakan serta mempertimbangkan dinamika lingkungan.
	f	Apakah terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam rumusan kebijakan?	Bobot 15%	Ya	Tidak	Jika "Ya", sebutkan bukti.	Monitoring dan evaluasi dibutuhkan untuk memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan penyusun kebijakan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Bukti terdiri dari Berita Acara, Notulensi, dsb.
	g	Apakah terdapat kelengkapan dokumentasi penyusunan kebijakan (termasuk risalah, hasil analisis, hasil konsultasi, dll) untuk bahan pembelajaran di masa depan?	Bobot 20%	Ya	Tidak	Jika "Ya", sebutkan bukti (notulen dan hasil pembahasan draft per tanggal)	Memuat kelengkapan dokumentasi dalam penyusunan kebijakan, yang terdiri dari risalah, hasil analisis, hasil konsultasi, dsb.
B.4	Inovatif (Bobot 20%)						
	a	Apakah ada aspek kebaruan, nilai tambah dan manfaat dalam rumusan dan/atau implementasi kebijakan?	Bobot 100%	Ya	Tidak	kolom penjelasan, jelaskan aspek aspek kebaruan, nilai tambah dan manfaat dalam rumusan dan/atau implementasi kebijakan	Perumusan kebijakan dapat mendorong tumbuhnya proses belajar dan inovasi dengan memanfaatkan pengetahuan yang dapat memberikan nilai tambah, kebaruan, dan manfaat dalam perumusan atau implementasi kebijakan.

B.5 Compliance/ kepatuhan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan (Bobot 20%)							
	a	Apakah ada proses harmonisasi dalam penyusunan kebijakan?	Bobot 25%	Ya	Tidak	Bukti pengiriman permohonan harmonisasi ke Kemenkum HAM	Harmonisasi yang dimaksud adalah adanya analisis yang menggambarkan tingkat sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.
	b	Apakah substansi kebijakan tidak tumpang tindih, duplikasi dan/atau kontradiktif dengan kebijakan yang sudah ada?	Bobot 25%	Ya	Tidak	Dokumen hasil harmonisasi oleh Kemenkum HAM	Posisi kebijakan tidak mengalami tumpang tindih, duplikasi dan/atau kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
	c	Apakah jangkauan kebijakan sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan?	Bobot 25%	Ya	Tidak	c.2).apakah pernah ada komplain dari OPD/unit organisasi lain tentang keberadaan kebijakan ini. c.1). apakah ada kebijakan sejenis yang dikeluarkan OPD/unit organisasi lain.	Kesesuaian yang dimaksud adalah kebijakan disusun dan dirumuskan oleh pejabat/aktor/pelaku pembuat kebijakan publik yang mempunyai kewenangan yang sah untuk ikut serta dalam formulasi kebijakan.
	d	Apakah dilakukan diseminasi/sosialisasi kebijakan? (selain mekanisme formal pengundangan setelah kebijakan ditetapkan)	Bobot 25%	Ya	Tidak	dokumentasi kegiatan	Diseminasi yang dimaksud adalah adanya kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat sebagai kelompok target atau individu yang memiliki kepentingan, agar mereka memperoleh informasi dan menerima kebijakan yang sudah dibuat.

Bagian 2: Penilaian Proses Pelaksanaan Kebijakan

C. PENILAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Presentase Bobot 60%)						
Tahapan/ Pertanyaan Kunci		Bobot	Jawaban		Bukti	Pedoman
C.1 Dimensi Pengorganisasian (Bobot 35%)						
	a	Apakah disusun rencana kerja implementasi?	Bobot 40%	Ya	Tidak	Jika "Ya", lampirkan bukti dokumen (TOR, KAK, RAB, dsb.) yang terkait. Jika "tidak" lanjut ke pertanyaan b Rencana kerja merupakan serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan/atau seseorang mencapai tujuan tersebut dan memuat rencana kerja, jadwal/road map/ rencana aksi dan rencana alokasi sumber daya.
	a.1	Apakah rencana kerja memuat jadwal/road map/rencana aksi?	Bobot 35%	Ya	Tidak	Timeline tahapan implementasi. Roadmap adalah petunjuk atau peta tentang susunan rencana kerja yang akan dilakukan dalam pekerjaan. Lampirkan dokumen terkait.
	a.2	Apakah rencana kerja memuat roadmap khusus rencana aksi dengan kelompok kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, pengusaha kecil, kelompok perempuan, kelompok ekonomi menengah ke bawah?	Bobot 35%	Ya	Tidak	Jika "Ya", sebutkan timeline impementasinya Lampirkan dokumen rencana terkait. Tuliskan rencana aksi yang secara spesifik menasar kepada kelompok rentan seperti GESI akan memasukan secara eksplisit indikator yang menasar kepada subyek GESI tersebut seperti kelompok perempuan, anak , kelompok disabilitas dan kelompok minoritas, pengusaha kecil, kelompok ekonomi menengah ke bawah.
	a.3	Apakah disusun rencana komunikasi kebijakan?	Bobot 30%	Ya	Tidak	Rencana komunikasi yang memuat target komunikan dan metode komunikasi. Dalam penentuan target itu dipastikan memasukkan kelompok yang mungkin terdampak oleh kebijakan, terutama kelompok rentan. Rencana komunikasi meliputi strategi diseminasi, fasilitasi dan advokasi kepada para pemangku kepentingan. Fasilitas dimaksud termasuk untuk memfasilitasi akses kelompok disabilitas dan mereka yang mungkin mendapatkan hambatan teknis suara dalam akses komunikasi.

	b	Apakah disusun pedoman/juknis pelaksanaan?	Bobot 10%	Ya	Tidak	Ada juknis	Pedoman ini berisi detail pelaksanaan kegiatan, dari persiapan sampai dengan selesai. Bentuknya dapat berupa turunan dari kebijakan yang ditetapkan misalnya surat edaran, peraturan teknis (misal bupati/walikota), surat keputusan, dll.	
	c	Apakah disusun rencana alokasi sumber daya manusia dan (dengan sertifikasi) kompetensi yang dibutuhkan (bentuk alokasi SDM)?	Bobot 10%	Ya	Tidak	Ada rencana alokasi SDM	Jumlah alokasi SDM harus sesuai dengan yang dibutuhkan agar efektif dan efisien	
	d	Terdapat organisasi/unit kerja atau dibentuk Tim/Pokja yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan.	Bobot 10%	Ya	Tidak	Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman, atau bentuk dokumen resmi lainnya	Berisi deskripsi kelembagaan yang dibentuk dan lampiran dokumen legal terkait kelembagaan.	
	e	Terdapat dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai tugas dan fungsi Organisasi/Unit kerja atau Tim/Pokja dalam implementasi kebijakan. (pelaksana melekat pada unit kerja yang memiliki tugas)	Bobot 10%	Ya	Tidak	Terdapat dokumen berisi Tupoksi	Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah dilakukan upaya perencanaan yang tepat untuk mendukung implementasi kebijakan.	
	f	Apakah didukung dengan alokasi anggaran yang sesuai?	Bobot 20%	Ya	Tidak	Disertakan rincian anggaran biaya		
	f.1	Bagaimana skema pembiayaan?		Instansi sendiri	pembiayaan bersama K/L/Pemda	Donor	Ada rincian biaya	Pembiayaan harus jelas darimana, ada rinciannya lebih baik. Tidak perlu skor

C.2 Dimensi Komunikasi Kebijakan (Bobot 40%)										
	a	Apakah disusun identifikasi kebutuhan target audience (pemangku kepentingan) dari komunikasi kebijakan?	Bobot 20%	Ya	Tidak	Harus dicantumkan stakeholder apa saja yang ada dalam proses, a. Internal b. Internal dan Eksternal (Pemda/OPD lain terkait) c. Internal dan Eksternal (Pemda/OPD lain, dan masyarakat/stakeholder)			Bagaimana bentuk partisipasi pemangku kepentingan? (Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah implementasi kebijakan didukung oleh aspek kelembagaan yang baik)	
	b	Media komunikasi apa yang digunakan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan?	Bobot 20%	Kegiatan (sosialisasi, seminar, workshop, FGD)		Media berbasis IT (milis, Website, aplikasi)		Media sosial	Lampirkan bukti yang relevan (bisa lebih dari satu)	Boleh diambil salah satu, lebih dari satu, atau dilakukan semua
	c	Frekuensi penggunaan media komunikasi dalam 2 tahun pertama.	Bobot 20%	Tidak pernah	1-2 kali	3-5 kali	6-8 kali	>8 kali		
	d	Apakah komunikasi kebijakan memberikan dampak terhadap efektifitas implementasi	Bobot 20%	Ya	Tidak	Jelaskan deskripsi bentuk dampaknya				
	e	Apakah komunikasi kebijakan memberikan input bagi perbaikan implementasi	Bobot 20%	Ya	Tidak	Jelaskan deskripsi input perbaikannya				

C.3 Pelaksanaan Monitoring (melakukan pemantauan terhadap proses implementasi kebijakan) (Bobot 25%)									
a	Bagaimana intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring?	Bobot 20%	Tidak pernah	setiap bulan	setiap triwulan	per semester	per tahun	Pilihan jawaban dapat diganti dengan range waktu	Dilihat frekuensi pelaksanaan monitoring pada suatu kebijakan yang telah diimplementasikan
b	Bagaimana kesesuaian antara rencana kerja dan implementasi?	Bobot 15%	Sesuai	Tidak sesuai, kenapa?		Jelaskan/lampirkan laporan monitoring dan evaluasi yang			
b.1	Apakah juga dilakukan monitoring dampak pelaksanaan kegiatan terhadap kelompok rentan seperti kelompok disabilitas,	Bobot 5%	Ya	Tidak		Jelaskan/lampirkan laporan monitoring dan evaluasi		Dilihat frekuensi pelaksanaan monitoring pada suatu kebijakan yang telah diimplementasikan	
c	Bagaimana implementasi dari rencana alokasi SDM (instansi yang menetapkan atau sasaran	Bobot 20%	Sesuai	Tidak sesuai		Alokasi SDM termasuk pelibatan JFAK dalam proses penyusunan			
d	Bagaimana implementasi dari rencana alokasi anggaran yang telah disusun?	Bobot 10%	Sesuai	Tidak sesuai		Lampirkan realisasi anggaran		Bisa menggunakan referensi BPK	
e	Apakah terjadi masalah dalam implementasi kebijakan misalnya dalam bentuk aduan,	Bobot 20%	Ada	Tidak		Jika "Ada", sebutkan jenis konflik yang terjadi?		Permasalahan/ kesenjangan	
e.1	Jika "Ada", apakah masalah dalam implementasi kebijakan dapat ditangani?	Bobot 100%	Ya	Tidak		Jika "Ya", jelaskan strategi resolusi konflik yang dilakukan?.			
f	Apakah terdapat kendala dalam melakukan monitoring terhadap implementasi	Bobot 10%	Ya	Tidak		Jika "Ya", jelaskan kendala pelaksanaan monitoring .			

D. PENILAIAN EVALUASI KEBIJAKAN (Presentase Bobot 40%)						
Tahapan/Pertanyaan Kunci		Bobot	Jawaban		Bukti	Pedoman
a	Efektivitas (Bobot 40%)					
a.1	Apakah tujuan yang direncanakan telah tercapai?	Bobot 30%	Ya	Tidak	Jika "Ya", sebutkan metode penilaian indikator seperti indikator di bagian C.1.a.2 sebelumnya, dan bagaimana hasil penilaiannya?	Kebijakan yang dibuat dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dari dibuatnya kebijakan tersebut misalnya menyelesaikan masalah publik tertentu. Tujuan kebijakan dapat dilihat dari ketercapaian tujuan jangka pendek, menengah dan panjang, mengingat umur kebijakan yang berbeda-beda.
a.2	Jika tujuan tidak tercapai, apakah terdapat mitigasi risiko	Bobot 40%	Ya	Tidak	Kolom penjelasan terkait mitigasi risiko	Kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan upaya penanganan dini atas risiko dari implementasi kebijakan
a.3	Apakah tujuan yang dicapai sebanding dengan sumber daya yang telah dialokasikan?	Bobot 30%	Ya	Tidak	Jika "Ya", sebutkan metode penilaian dan hasil penilaiannya.	Sumber daya merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam membuat ataupun menjalankan kebijakan. Bahan-bahan tersebut seperti: anggaran, SDM, peralatan penunjang kebijakan, waktu, dll.
b	Efisiensi (Bobot 25%)					
b.1	Apakah <i>input</i> (semua sumber daya) yang digunakan telah menghasilkan <i>output</i> yang diharapkan?	Bobot 100%	Ya	Tidak	Dibandingkan antara pembiayaan dan output dari kegiatan penyusunan kebijakan. Realisasi anggaran dan output (Anggaran >=80% - 100%).	Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk membuat Output merupakan keluaran atau produk atau kebijakan. Efisiensi dilihat dalam visi pemerataan dan keadilan dalam pembangunan termasuk meningkatkan peran kelompok rentan dalam proses kebijakan.

c Dampak (Bobot 25%)							
	c.1	Apakah ada nilai tambah lain terhadap pencapaian misi organisasi	Bobot 50% -75	Ya	Tidak	Kolom penjelasan (dengan data pendukung yang relevan)	Nilai tambah merupakan manfaat lain yang diberikan dari dibuat dan dijalankannya kebijakan khususnya pada pencapaian misi organisasi. Kebijakan yang inklusif GESI dapat dijadikan nilai tambah dan dampak positif dari kebijakan
	c.2	Apakah kebijakan memberikan manfaat kepada kelompok rentan seperti orang dengan disabilitas, anak,	Bobot 50% -25	Ya	Tidak	Kolom penjelasan	Kebijakan yang dibuat diharapkan juga mengakomodir kelompok rentan seperti orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.
d Kesesuaian dengan nilai (Bobot 25%)							
	d.1	Apakah kebijakan telah mencerminkan/mendorong keadilan akses kepada kelompok sasaran?	Bobot 50%	Ya	Tidak	Dijelaskan dengan rumusan dalam kebijakan dan/atau implementasi kebijakan yang mencerminkan/mendorong keadilan	Kebijakan yang dibuat didasarkan pada asas keadilan seperti keadilan gender, keadilan kaya - miskin, dll serta tidak diskriminatif.
	d.2	Apakah kebijakan telah mencerminkan kemudahan akses bagi kelompok rentan?	Bobot 50%	Ya	Tidak	Dijelaskan dengan rumusan dalam kebijakan dan/atau implementasi kebijakan yang	Kebijakan yang dibuat dapat memberikan kemudahan akses seperti akses bidang pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun akses pada bidang - bidang lain.